



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DYAH SULISTYA RATNAWATI
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG SARANA DAN PRASARANA
3. NHK : 184264

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.890.000.000

1. Tanah Seluas 594 m2 di KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 209 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. Tanah Seluas 353 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
4. Tanah Seluas 311 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 528 m2/100 m2 di PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 304 m2 di PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 450.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 12.435.102**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	2.384.435.102
III. HUTANG	Rp.	30.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.354.435.102

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.